

Evaluasi Pelayanan Kegawatdaruratan Maternal Neonatal Pada Puskesmas Mampu Pelayanan Obstetri Dan Neonatal Emergensi Dasar (Poned) di Kabupaten Bantul

Christina Pernatun Kismoyo, Mubasyisyir Hasanbasri

Latar belakang: Kemajuan pencapaian tujuan pembangunan milenium atau Millenium Development Goals (MDGs) Indonesia masih buruk. Sekalipun targetnya mulai diupayakan tercapai namun tetap saja status pencapaiannya masih rendah. Salah satunya adalah pencapaian penurunan angka kematian ibu bersalin. Setiap kehamilan dan persalinan merupakan kejadian berisiko, oleh karena itu setiap ibu hamil dan bersalin harus berada sedekat mungkin dengan pelayanan obstetrik emergensi dasar. Sebagai unit pelayanan kesehatan yang dekat dan mampu terjangkau oleh masyarakat Puskesmas diharapkan mampu memberikan pelayanan obstetrik neonatal emergensi dasar. Di Kabupaten Bantul ada 6 puskesmas mampu PONED. Program Puskesmas PONED dalam pelaksanaannya perlu adanya suatu langkah evaluasi, guna meningkatkan ataupun mempertahankan suatu mekanisme yang sudah baik atau kurang baik.

Tujuan: Untuk melihat implementasi pelayanan puskesmas mampu kegawatdaruratan Obstetrik dan Neonatal Dasar (PONED) di Kabupaten Bantul.

Metodologi: Penelitian diskriptif kualitatif dengan unit analisis adalah petugas (dokter, bidan, perawat, laboran dan sopir) serta kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul. Instrumen penelitian adalah peneliti sendiri, alat yang digunakan kamera, *tape recorder*, daftar tilik, dan pedoman wawancara.

Hasil: Puskesmas PONED lebih dipandang sebagai pekerjaan rutinitas karena provider pelayanan belum mampu memahami tujuan pelayanan dengan baik. Pelayanan kegawatdaruratan obstetrik dan neonatal belum seluruhnya dapat dilayani di 6 puskesmas hanya Sewon I. sistem pendukung pelayanan PONED tersedia, namun ketersediaan pelayanan belum seluruhnya tersedia yakni; alat, obat dan infrastruktur. Hal ini karena jarangny kasus komplikasi obstetri dan neonatus yang ditangani sehingga obat dan alat yang tersedia kadaluarsa serta rusak. Pengelolaan rujukan kasus kegawatdaruratan obstetri dan neonatal belum berjalan dengan baik sesuai dengan kasus, cenderung melakukan rujukan dini.

Kesimpulan: Konsep program pemerintah dalam percepatan penurunan kematian ibu dan neonatal tidak sampai pada daerah khususnya tingkat kabupaten. Hal ini nampak pada evaluasi pelayanan puskesmas PONED, dimana manajemen pelayanan puskesmas PONED lebih pada birokrasi belum berdasarkan pada *setting* pelayanan kegawatdaruratan obstetrik dan neonatal, sehingga orientasi petugas pelayanan dipandang sebagai pekerjaan rutinitas. Diharapkan dukungan pemerintah dalam *support* insentif akan berpengaruh pada motivasi kerja petugas pelayanan.

Kata kunci: Evaluasi, Pelayanan puskesmas, PONED.